

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- A.M Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Abu Daud Busroh. 1998. *Pemeriksaan Keuangan Negara*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Angga Ranggana Putra dkk. 2021. *Ilmu Manajemen (Teori dan Aplikasi)*. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Daan Sugandha. 1989. *Pengantar Administrasi Indonesia*, Intermedia. Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2021. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- George R. Terry dan Leslie W. Rue. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Idris, M.M dan Soenarno. 1983. *Aspek Teknis Eksploitasi Hutan Pinus di Pulau Jawa, Prooceding Simposium Pengusahaan Hutan Pinus*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI. 1996. *Sistem Administrasi Negara RI*. Jilid II. Toko Gunung Agung. Jakarta
- Muchsan. 1992. *Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty. Yogyakarta.

- Manulang. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nugraha, Agung, dan Murjito. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Wana Aksara. Banten.
- Nomensen Sinamo. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata Aksara. Jakarta
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- . 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Salim H.S. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soewarno Hardiningrat. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV. Bandung.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suhendang. 2002. *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 434/Menhut-II/2009 Tentang Pemutakhiran Kawasan Hutan Tahun 2017.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor SK. 1/L.15/PTSP/2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah.

Jurnal

A.M Yunus Wahid, Naswar Bohari, Achmad Achmad. "*Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)*". Hasanuddin Law Review. Universitas Hasanuddin. Vol.1. No. 1 April 2015.

Ali Marwan HSB dan Evlyn Martha Julianthy. "*Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*". Jurnal Legislasi Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM. Vol. 15 No. 2 Juli 2018.

- Arhamullah, Abdi, dan Fatmawati. *“Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Gowa”*. Kajian Ilmiah Mahasiswa administrasi (KIMAP). Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol. 2 No. 6 Desember 2021.
- Ilham Hidayat Aziz, Anshori Ilyas, dan Zulkifli Aspan. *“Politik Hukum Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”*. Jurnal Sosio Sains. Vol. 8 No. 2 Oktober 2022.
- Muhammad Rifkih Alfaris, Rafiqi, dan Rizkan Zulyadi. *“Peran Dinas Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus: Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)”*. Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum. Universitas Medan Area. Vol. 3 No. 2 2021.
- Muhammad Rizky Prayogie. *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengrusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN.Rhl)”*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Universitas Islam Sumatera Utara. Vol. 1 No. 1 September 2020.
- Muhammad Zulfan Hakim, *“Izin Sebagai Instrumen Pengawasan dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”*, Jurnal Hukum Islah, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Vol. 29 Mei 2011.
- Mody Lempang. *“Pemungutan Getah Pinus dengan Tiga Sistem Penyadapan”*. Buletin Eboni. Balai Litbang Lingkungan Hidup dan kehutanan Makassar. Vol. 15 No. 1 Juli 2018.
- Nurmayani. *“Pengawasan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame”*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Lampung. Vol. 6. No. 3 Tahun 2012.
- R. Agus Abikusna. *“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”*. Jurnal Sosfilkom: Sosial, Filsafat, dan Komunikasi. FISIP-UMC. Volume XIII No. 1 Januari-Juni 2019.
- Sri Nur Hari Susanto. *“Karakter yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”*. Administrative Law & Governance Journal. Departemen Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. 2 No. 1 Maret 2019.

Wicipto Setiadi. "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Legislasi Indonesia. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan HAM RI. Vol. 6 No. 4 Desember 2009.

Internet

Pemerintah Kabupaten Gowa. 2019. "Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa". melalui <http://gowakab.go.id/wp-content/uploads/DIKPLHD-KABUPATEN-GOWA-2019.pdf>, diakses 23 Juni 2022, Pukul 01.22 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring edisi III. Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). melalui <https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses 12 Juli 2022, Pukul 09.38 WITA.

Perhutani. "Manfaat Pohon Pinus untuk Kesehatan dan Industri, Penting Diketahui". melalui <https://www.perhutani.co.id/manfaat-pohon-pinus-untuk-kesehatan-dan-industri-penting-diketahui/> diakses 23 Mei 2022, pukul 14.35 WITA.

TanahKita. "Data Konflik" melalui <https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/QVJpUFJpQjJuekk> diakses Senin, 23 Mei 2022, pukul 12.50 WITA.

Zul Akrial. "Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) di Indonesia". www.legalitas.org diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 02.39 WITA.